



Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur

Salma Putri Nurhadi^{1*}, Khaerul Umam Noer², Nida Handayani³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan

*Korespondensi penulis: salmaputri6702@gmail.com

Abstract: The issue of poverty can be seen as a widespread social phenomenon that impacts various regions and provinces in Indonesia. Poverty can have implications in the fields of health and education. Therefore, various efforts by the government to address poverty-related issues through innovations and policies, one of which is the Program Keluarga Harapan (PKH), are expected to reduce poverty rates in Indonesia. The aim of this research is to understand and analyze the Effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Enhancing Community Welfare in the Village of Watu Lanur, Lamba Leda Selatan District. This study utilizes a descriptive research method with a qualitative approach, collecting data through interviews, observations, and documentation. The identified issues in this study pertain to the amount of assistance received and the perception that the Family Hope Program (PKH) is still not precisely targeted. The research findings indicate that the PKH in the village of Watu Lanur has been able to empower the community, as many people have benefited from the social assistance mandated by government regulations. Based on the effectiveness achieved regarding the implementation of the PKH program in Watu Lanur village, it is evident that the response and efforts of the local government have been commendable, despite some challenges that need to be addressed with solutions.

Keywords: Effectiveness, Program Keluarga Harapan (PKH), community welfare.

Abstrak: Permasalahan kemiskinan dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang meluas dan berdampak pada berbagai wilayah dan provinsi di Indonesia. Kemiskinan dapat memberikan dampak permasalahan di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dengan berbagai inovasi dan kebijakan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan cara untuk mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai jumlah bantuan yang diterima dan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai masih tidak tepat sasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH di Desa Watu Lanur mampu memberdayakan masyarakat, karena ada banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan sosial yang sudah menjadi ketetapan pemerintah dengan landasan regulasi undang-undang. Berdasarkan efektivitas yang sudah terlaksana terkait pelaksanaan program PKH di Desa Watu Lanur menunjukkan bahwa respon dan upaya pemerintah setempat sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yang harus diupayakan solusinya.

Kata kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan umum yang dihadapi di Indonesia adalah permasalahan ekonomi yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di negara Indonesia. Permasalahan kemiskinan dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang meluas dan berdampak pada berbagai wilayah dan provinsi di Indonesia. Indonesia telah lama menghadapi tantangan kemiskinan terus menerus, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah penduduk sebanyak 278.696 juta jiwa pada

pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya, pertengahan 2022 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 275.773 juta jiwa. Persentase jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2023 sebesar 9,36 persen menurun 0,18 terhadap Maret tahun 2022. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada maret tahun 2023 sebesar 25,90 juta orang menurun 0,26 juta orang terhadap Maret tahun 2022. (BPS 2023).

Kemiskinan dapat memberikan dampak permasalahan di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Di bidang kesehatan dampak kemiskinan dapat menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat miskin rentan terjangkit penyakit, selain itu ibu hamil berisiko kekurangan gizi yang mempengaruhi perkembangan janin dan tingkat kelahiran hidup. Di bidang pendidikan dampak kemiskinan pada bertambahnya jumlah anak putus sekolah dari keluarga miskin (Indrayani, 2007). Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH didefinisikan sebagai program bantuan bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan memutuskan rantai kemiskinan. Di dunia internasional program ini dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) yang terbukti sangat efektif dalam memerangi kemiskinan di semua negara. Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin atau yang dikenal dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Hal ini bertujuan supaya keluarga miskin memiliki akses yang lebih baik dalam memanfaatkan segala bentuk program yang dirancang pemerintah untuk pemerataan seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi masalah pada masyarakat miskin. Keluarga miskin yang menerima PKH dikenal dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak daerah-daerah yang sudah tersentuh oleh program ini, salah satunya di Desa Watu Lanur. Desa yang terletak di Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, merupakan salah satu desa yang menjadi usasaran PKH dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.221 jiwa. Desa Watu Lanur sendiri merupakan desa yang dikatakan 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Pembangunan yang tidak merata menyebabkan akses ke desa sulit terjangkau, karena perlu menempuh perjalanan yang jauh dan medan jalan yang sulit. Daerah 3T ini merupakan unit analisis yang menarik untuk mendeskripsikan mengingat pentingnya daerah ini untuk diangkat ke permukaan sehingga mendapatkan perhatian yang lebih besar. Permasalahan Pendidikan yang timbul di wilayah 3T meliputi mutu pendidikan yang rendah, angka partisipasi sekolah

yang masih rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih kurang.

Ketika beberapa aspek tersebut tergolong rendah atau bermasalah, tentu akan berakibat pada pendidikan itu sendiri. Di bidang kesehatan sendiri di wilayah 3T kesulitan mengakses layanan kesehatan karena persebaran tenaga medis yang cenderung tidak merata, selain itu di wilayah 3T stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang memiliki dampak buruk bagi anak, dan aksesibilitas masyarakat yang terkendala transportasi, kondisi geografis bahkan ketidakmampuan masyarakat untuk menggunakan haknya dalam BPJS. Keadaan masyarakat di Desa Watu Lanur bisa dikatakan berada di bawah garis sejahtera karena pendapatan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan pengeluarannya. Mayoritas masyarakat hampir 90% bekerja sebagai petani, penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Dengan keterbatasan baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, masyarakat kurang memperhatikan kondisi kesehatannya dan tingkat pendidikan yang rendah karena pendapatan ekonomi mereka tidak mencukupi.

PKH sebagai program pemerintah diperlukan pengukuran efektif atau tidak efektifnya suatu program tersebut berjalan, untuk melihat sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Penentuan suatu program bisa dikatakan efektif atau tidak efektif didasarkan oleh adanya faktor pemahaman diri dari pelaksana dan penerima dengan penuh kesadaran dari lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil Judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur”.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas berasal dari kata effective yang berarti keberhasilan atau akibat (pengaruh, kesamaan, membawa hasil dan manfaat). Efektif merupakan kata dasar, sedangkan kata sifat dari efektif adalah efektivitas. (Steers, 1985) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah jangkauan usaha program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu sendiri serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Pendapat ini menjelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian yang sesuai dengan harapan yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Efektivitas program juga suatu pengukuran atau penilaian terhadap sejauh mana suatu kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi tersebut.

Program Keluarga Harapan atau yang disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Menurut buku Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021, “PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”. Di dunia internasional program ini dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) yang terbukti sangat efektif dalam memerangi kemiskinan di semua negara. Bantuan PKH diberikan 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun yang dijadwalkan tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang Sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang meningkat dan merata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan apa adanya tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur. Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur pada September 2023 hingga Januari 2024 dengan sistem observasi dan wawancara. Adapun dalam pemilihan beberapa narasumber ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dimana

teknik mengambil orang-orang yang terlibat langsung dalam Program Keluarga Harapan Desa Watu Lanur dan dipilih berdasarkan yang paling mengetahui pelaksanaan dan dampak dari Program Keluarga Harapan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Watu Lanur merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Desa yang ada di Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur. Desa Watu Lanur didirikan pada tahun 1991 dan dipimpin oleh Bapak Fransiskus Sanur, S.Pd., M.Hum. dengan Sekretaris Desa adalah Bapak Marselus Rabu. Desa Watu Lanur memiliki luas wilayah 1.991 km yang terdiri atas 2 (dua) Dusun, 9 (sembilan) Rukun Warga dan 4 (empat) Rukun Tetangga. Batas-batas wilayah Desa Watu Lanur meliputi: sebelah Timur berbatasan dengan Desa Compang Weluk. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Leong. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tengku Lawar.

Mata pencaharian penduduk Desa Watu Lanur mayoritas masyarakat hampir 90% bekerja sebagai petani, dengan hasil pertanian utama antara lain padi dan kopi. Terdapat Sarana dan Prasarana seperti 1 PUSTU (Puskesmas Pembantu) berjumlah 1 unit, SD 1 unit dan SMP Negeri 1 unit, serta rumah ibadah Kapela Stasi berjumlah 1 unit. Desa Watu Lanur memiliki jumlah penduduk 1.321 jiwa yang terdiri dari 646 jiwa laki-laki dan 657 jiwa Perempuan dengan 297 Kepala Keluarga (KK). Hasil penelitian ini merupakan data yang ditemukan secara factual di lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mengacu pada teori efektivitas program menurut Budiani (2007) yang mencakup beberapa indikator yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur.

Interpretasi Pembahasan Ketepatan Sasaran Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Watu Lanur dan Kepala Desa Watu Lanur, dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran program yang telah berjalan sejak tahun 2013 dan umumnya dianggap sudah tepat sasaran. Mayoritas penerima bantuan sosial PKH adalah mereka yang berprofesi sebagai petani atau pekebun, dan kepesertaan PKH ditentukan berdasarkan keberadaan data keluarga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pendamping PKH menyatakan bahwa ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial ganda, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) atau bantuan sembako, namun tidak semua KPM PKH menerima bantuan sembako. Terdapat kendala dalam proses penentuan KPM yang berhak menerima PKH, di mana kegiatan Musyawarah Desa yang seharusnya bisa menjadi faktor penentu belum dimaksimalkan di Kabupaten Manggarai Timur. Sebagai gantinya, desa hanya memberikan masukan kepada pendamping tentang layak atau tidaknya sebuah keluarga menerima bantuan sosial. Kepala Desa Watu Lanur juga mengakui bahwa PKH telah tepat sasaran dan sangat membantu ekonomi keluarga miskin, meskipun masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial pemerintah sejenis PKH. Proses pengusulan calon KPM PKH dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan kondisi keluarga yang menjadi sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat disimpulkan bahwa KPM umumnya merasa terbantu dengan adanya program ini. Meskipun mereka mengakui bahwa bantuan yang diterima masih kurang, namun bantuan tersebut telah membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu informan, Informan 7, menyatakan bahwa dia merasa cukup sejahtera karena program ini juga turut membantu dalam memenuhi kebutuhan yang ada dan program ini perlu terus dilanjutkan. Informan 7 juga menjelaskan bahwa dia melakukan pencairan bantuan sendiri dan merasa bahwa peninjauan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan dengan baik. Dia merasa bahwa setelah menerima PKH, dia telah merasakan peningkatan kesejahteraan dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks pendidikan, beberapa KPM telah mampu menyekolahkan anak mereka sampai pada tingkat perguruan tinggi. Meskipun bantuan PKH mungkin tidak terlalu besar, namun dari testimoni beberapa KPM PKH, bantuan yang mereka terima selama ini sudah sangat membantu KPM dalam pendidikan anak-anak mereka. Namun, ada juga beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPM. Misalnya, ada KPM yang sudah mendapatkan kartu PKH namun belum mendapatkan transferan di rekening. Selain itu, masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial pemerintah sejenis PKH ini. Kendala lain yang dihadapi adalah tidak sinkronnya data di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kondisi riil KPM. Hal ini dapat berpengaruh pada tersalurnya bantuan PKH atau tidak. Untuk mengatasi kendala ini, keluarga yang bersangkutan harus mengupdate Kartu Keluarga (KK) di kantor Dinas Dukcapil.

Upaya yang dapat dilakukan dalam persoalan terkait penentu KPM yang berhak menerima yakni dapat berupa Kementerian Sosial selaku pusat yang sebaiknya harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyaluran PKH hingga memastikan bansos diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendataan PKH dengan mendata pemohon dalam forum pengaduan dan menjelaskan kriteria PKH secara konsisten. Melakukan pendataan ulang dan meninjau kembali penerima bantuan PKH sehingga dapat berjalan tepat sasaran. Form pengaduan tersebut dapat diraih melalui Ombudsman RI yang memiliki layanan informasi dan pengaduan dengan mengandeng Himbara sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos non tunai di seluruh Indonesia.

Bank-bank tersebut menyalurkan bansos sesuai yang diinstruksikan Kemensos. Dengan demikian, selain dari upaya pemerintah, apabila masyarakat menemukan penerima program yang dinilai mampu dan sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial, masyarakat dapat melapor melalui Pendamping bansos, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau langsung ke Dinas Sosial dengan menyertakan identitas, alamat terlapor serta bukti-bukti yang jelas agar dapat ditindaklanjuti sehingga pendataan bansos menjadi lebih mudah dan efektif. Masyarakat juga dapat memanfaatkan mobile app CekBansos dari Kementerian Sosial RI untuk memberikan tanggapan kelayakan bagi penerima bantuan sosial yang ada di sekitar.

Interpretasi Pembahasan Sosialisasi Program

Dari informasi yang disampaikan oleh pendamping PKH dan Kepala Desa Watu Lanur, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi PKH di Desa Watu Lanur telah dilakukan dengan baik dan mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan program tersebut. Sosialisasi yang efektif ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari PKH, serta prosedur dan kebijakan yang terkait dengan program ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, yaitu Informan 7, terungkap bahwa meskipun mereka merasa masih ada kekurangan, mereka merasa terbantu dengan adanya program PKH. Informan 7 merasa cukup sejahtera karena program ini turut membantu dalam memenuhi kebutuhan yang ada dan berpendapat bahwa program ini perlu terus dilanjutkan.

Dari pandangan KPM ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program PKH telah cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari program ini. Meski demikian, masih ada ruang untuk peningkatan dalam

pelaksanaan dan sosialisasi program ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Namun, meski sosialisasi telah berjalan cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu KPM PKH, meski mereka merasa terbantu dengan adanya program PKH, mereka merasa masih ada kekurangan. Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dikaitkan dengan indikator sosialisasi program, dapat dikatakan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Watu Lanur dilaksanakan dengan efektif. Hal ini sejalan dengan indikator sosialisasi program menurut teori Budiani, yang mencakup penyebaran informasi yang luas, pemahaman masyarakat yang baik, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Efektivitas sosialisasi yang dinyatakan efektif ini karena adanya koordinasi pemerintah daerah dan pusat serta pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilakukan beberapa kali meskipun masih terdapat ruang masyarakat yang belum sepenuhnya memahami terkait PKH.

Interpretasi Pembahasan Tujuan Program

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dikaitkan dengan indikator tujuan program, indikator ini berhasil mencapai tujuan umum dan khusus yang telah ditetapkan seperti peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku KPM, dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak KPM. Meskipun terdapat ruang untuk peningkatan dan perluasan cakupan program guna mencapai lebih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan permasalahan dimana beberapa KPM telah berhasil menyekolahkan anak mereka hingga tingkat perguruan tinggi. Meskipun bantuan PKH tidak terlalu besar, namun bantuan tersebut telah sangat membantu KPM dalam pendidikan anak-anak mereka dan masih ada yang belum menerima bantuan adalah suatu masalah yang membutuhkan upaya meningkatkan efektivitas serta mencapai dampak lebih besar. Upaya tersebut yang pertama adalah fokus pada pemerataan pembagian bantuan, jika masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan namun sangat membutuhkan artinya efektivitas masih belum seutuhnya terbangun dan dampak belum terasa sepenuhnya. Dengan demikian pemerintah perlu melakukan pendataan ulang secara lebih konsisten dan masyarakat dapat melaporkan baik terhadap pemerintah daerahnya langsung dan secara rutin penyelenggara seharusnya melakukan riset dan cek apakah warga yang membutuhkan sudah menerima haknya atau belum.

Hal ini juga dapat berkenaan dengan sosialisasi dimana sosialisasi di Desa Watu Lanur diselenggarakan pada awal pelaksanaan saja, seharusnya hampir setiap minggu dan setiap bulan dilakukan sosialisasi pada setiap titik wilayah agar pendataan menjadi lebih spesifik dan jelas. Selain itu, upaya kesejahteraan masyarakat artinya memenuhi aspek pendidikan dan pelatihan secara merata dan dampaknya yang perlu dirasakan sebagai bentuk keluhan. Penerima Manfaat PKH akan dapat merasakan pelayanan kesehatan yang layak tanpa mengeluarkan biaya yang mahal dan mudah dalam pelayanan. Keluarga Penerima Manfaat PKH juga mendapatkan pelayanan yang menghemat waktu dan mudah disentuh oleh masyarakat tanpa membedakan strata sosial.

Interpretasi Hasil Wawancara Pemantauan Program

KPM merasa cukup sejahtera setelah menerima bantuan dari PKH, yang menunjukkan bahwa proses pemantauan program telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya, setidaknya pada tingkat individu. Informan 7 juga mengungkapkan bahwa mereka secara aktif terlibat dalam pencairan bantuan, menunjukkan partisipasi langsung KPM dalam proses pemantauan dan pencairan dana PKH. Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dikaitkan dengan indikator pemantauan program, dapat dikatakan bahwa Pemantauan PKH di Desa Watu Lanur belum sepenuhnya berhasil. Dikarenakan sudah melakukan pemantauan program dengan baik melalui pertemuan kelompok, namun kendalanya dapat dilihat pada saat ketika KPM tidak mendapatkan transferan bantuan rekening, sehingga penanganan belum berjalan dengan baik dan perlu adanya perbaikan.

Bentuk perbaikan atas masalah belum didapatnya transferan bantuan rekening hingga penanganan penanganan PKH yang belum berjalan baik harus diupayakan solusinya. Adapun solusi atas masalah transferan bantuan rekening yang dapat diberikan ialah mengatasi proses cetak rekening koran yang ternyata tidak bisa diwakilkan, harus oleh pemilik rekening itu sendiri dengan membawa KTP, Buku Tabungan dan KKS. Adanya program PKH ini mampu memberdayakan masyarakat, karena ada banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan sosial yang sudah menjadi ketetapan pemerintah dengan landasan regulasi undang-undang. Berdasarkan efektivitas yang sudah terlaksana terkait pelaksanaan program PKH di Desa Watu Lanur menunjukkan bahwa respon dan upaya pemerintah setempat sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yang harus diupayakan solusinya. Dalam jangka pendek, program PKH sudah terasa manfaat dan pemberdayaan bagi sektor pendidikan, bantuan secara finansial, dan lainnya.

Hanya saja perlu lebih disebarluaskan dan disamaratakan agar keluarga tidak mampu lainnya dapat merasakan manfaat diberdayakan oleh progresm PKH.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program PKH (Program Keluarga Harapan) pada Desa Watu Lanur, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur mampu memberdayakan masyarakat, karena ada banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan sosial yang sudah menjadi ketetapan pemerintah dengan landasan regulasi undang-undang. Berdasarkan efektivitas yang sudah terlaksana terkait pelaksanaan program PKH di Desa Watu Lanur menunjukkan bahwa respon dan upaya pemerintah setempat sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yang harus diupayakan solusinya. Dalam jangka pendek, program PKH sudah terasa manfaat dan pemberdayaan bagi sektor pendidikan, bantuan secara finansial, dan lainnya.

Berdasarkan dimensi ketepatan sasaran program, PKH di Desa Watu Lanur sudah tepat sasarannya dengan fokus pada keluarga miskin yang berprofesi sebagai petani atau pekebun. Berdasarkan dimensi sosialisasi program sudah dilaksanakan oleh pemerintah setempat dengan cukup baik namun masalah ada pada durasi yang tidak ditetapkan pada Permensos dan sosialisasi hanya dilakukan diawal saja sehingga dalam rangka mengoptimalkannya harus dilakukan secara rutin hingga merata dan mampu menjawab kebingungan atau kendala masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan dimensi pemantauan program, dapat dikatakan bahwa Pemantauan PKH di Desa Watu Lanur belum sepenuhnya berhasil. Adapun kunci dalam pelaksanaan pemantauan atau monitoring berjalannya PKH adalah koordinasi pendamping PKH dengan pihak kecamatan dan koordinasi yang efektif antara kedua belah pihak ini memiliki dampak positif dalam memaksimalkan efisiensi program dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah sosialisasi seharusnya lebih intensif dan mengacu pada jangka waktu beberapa bulan hingga bisa merata dan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memahami PKH dan cara pencairannya. Peningkatan ini bisa dilakukan dengan fokus pada pemerataan pembagian bantuan, jika masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan namun sangat membutuhkan artinya efektivitas masih belum seutuhnya terbangun dan dampak belum terasa sepenuhnya. Solusi meningkatkan koordinasi pendamping PKH dengan pihak kecamatan. Koordinasi yang efektif antara kedua belah pihak ini memiliki dampak positif dalam memaksimalkan efisiensi program dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal:

- Arda, I. Z. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Studi pada Bidang Pendidikan di Nagari Pangkalan Koto Baru) Sumatera Barat. Universitas Islam Riau.
- Ariani, D. R. (2022). Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) di PT Pertani (Persero) Tahun 2020 – 2021. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Aziz, S. S. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Subang. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1).
- Darmastuti, E., & Widiyanto, M. K. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(04), 31–41.
- Daud, M., & Yusuf, M. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora*, 2(2), 244–255.
- Fauziah, R. C. (2023). Efektivitas Penerapan Program E-Puskesmas Next Generation (NG) di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ibrahim. (2021). Peran Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Pare.
- Indrayani, F. K. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *EJournal UNESA*, 2(3), 1–11. <https://doi.org/10.26740/publika.v2n3.p%25p>
- Nurhafifa, A. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mabonta Kec. Burau. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Senduk, N. V., Kiyai, B., & Plangiten, N. (2021). Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 40–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33294/31487>

Syahidah, F., Hakim, L., & Nababan, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pusakajaya Selatan. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420.

Tamara, M. (2022). Efektivitas Program Indonesia Pintar Tahun Ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Wulandari, F., Yamardi, Y., & Rohayatin, T. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Caraka Prabu, 4(1), 31–46. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.206>

Peraturan Perundang-Undangan:

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2022). Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 9/3/BS.02.01/2/2022 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Buku Teks:

BBPPKS Padang. (2022). Bimtek Pra Sertifikasi SDM Kesos: Pendamping Sosial PKH. Padang.

Handayaningrat, S. (1990). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Kementerian Sosial RI. (2021). Buku Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

Nazarudin, P. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021 (Vol. 5, Issue 2). Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2007). Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber dari Internet tanpa Nama Penulis:

Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2023. BPS. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

Digital Desa. (2023). Bansos PKH 2023: Jadwal, Nominal, dan Cara Mendapatkan Bantuan. Diakses tanggal 15 Oktober 2023 dari <https://digitaldesa.id/artikel/bansos-pkh-2023-jadwal-nominal-dan-cara-mendapatkan-bantuan>

Sorot NTT. (2023). Program PKH Dinilai Tidak Tepat Sasaran. Diakses tanggal 16 Oktober 2023 dari <https://sorotntt.com/program-pkh-dinilai-tidak-tepat-sasaran/>

Vox NTT. (2019). Penerima Dana PKH Satar Tesem Matim Cium Aroma Kurang Sedap. Diakses tanggal 16 Oktober 2023 dari <https://voxntt.com/2019/11/19/penerima-dana-pkh-satar-tesem-matim-cium-aroma-kurang-sedap/55006/>